



**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG PENUMBUHAN BUDI PEKERTI (PBP) PADA
SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 37 SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:
Tirani Agestia
NIM 3301412044

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

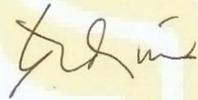
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jumat*

Tanggal : *21 Juli 2017*

Pembimbing Skripsi I



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

Pembimbing Skripsi II

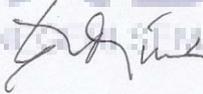


Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si
NIP. 197112042010121001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Sakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jumat*

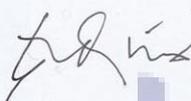
Tanggal : *4 Agustus 2017*

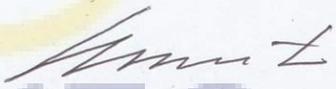
Penguji I


Dr. Suprayogi, M.Pd.
NIP. 195809051985031003

Penguji II

Penguji III


Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001


Noorochmat Isdaryanto, S. S., M.Si
NIP. 197112042010121001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

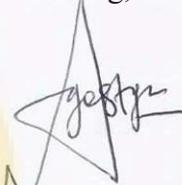


Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2017



Tirani Agestia
3301412044



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Rasulullah SAW. Bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik budi pekertinya." (HR Bukhari dan Muslim).
- Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi runtuhlah bangsa (Buya Hamka).

PERSEMBAHAN

1. Untuk Almarhum Ayahanda tercinta Muziaroni dan Ibunda tercinta Chayati yang senantiasa mendoakanku dan memberikan dukungan.
2. Untuk Adikku tersayang Laela Dwi Lestari yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Untuk Keluarga Besar Nenek Daumi yang senantiasa mendukungku.
4. dan untuk Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

SARI

Agestia, Tirani. 2017, *Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang.* Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Tijan, M.Si dan Noorochmat Isdaryanto, S. S., M.Si.

Kata Kunci: Implementasi, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015, Siswa

Globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perkembangan masyarakat, terutama terhadap remaja yang sedang dalam tahap perkembangan. Dampak negatif globalisasi erat kaitannya dengan perilaku remaja di Indonesia. Masa remaja merupakan masa transisi dimana seseorang beranjak dan juga tumbuh dari anak menuju dewasa khususnya perubahan lingkungan dari SD ke SMP yang dihadapi oleh siswa kelas VII. Perlunya penanaman nilai dan moral bangsa untuk meminimalisir pengaruh negatif globalisasi salah satunya melalui lingkungan pendidikan formal. Sistem pendidikan dibawah naungan Kemendikbud mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yaitu Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka permasalahan dan tujuan yang diambil adalah Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015 terdapat tujuh kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa. Kegiatan pembiasaan telah dilaksanakan dengan baik di SMP Negeri 37 Semarang. Karena telah menumbuhkembangkan kebiasaan baik sebagai bentuk penumbuhan budi pekerti pada siswa disekolah.

Dalam pelaksanaannya sekolah menerapkan kegiatan pembiasaan tambahan kepada siswa kelas VII yaitu melakukan hormat bendera setelah menyanyikan lagu kebangsaan setiap pagi yang disesuaikan dengan budaya sekolah. Sehingga mampu menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi pada diri siswa. Kendala yang dihadapi berpusat pada latar belakang keluarga siswa yang kurang baik. Saran, perlu adanya sosialisasi dan seminar parenting dari pihak sekolah kepada orangtua siswa terkait dengan penumbuhan budi pekerti dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015.

ABSTRACT

Agestia, Tirani. 2017, *Implementation of Permendikbud No. 23 Year 2015 about Persevering Character of Seventh Graders in SMP Negeri 37 Semarang.* Department of Pancasila and Civic Education Faculty of Social Sciences Semarang State University. Drs. Tijan, M.Si dan Noorochmat Isdaryanto, S. S., M.Si.

Keywords: Implementation, Permendikbud No. 23 Year 2015, Students

Globalization does not only give positive impacts in society's development, especially in teenagers who are in the process of developing into an adult. Globalization can impact negatively towards the development of Indonesian teenagers. Teen years are filled by transition process especially environmental transisiton that is faced by the seventh graders from 6th grade in elementary school. Formal education is one of the way to solve the negative impacts emerging from globalization. Indonesia's Ministry of Education and Culture offers Permendikbud No. 23 Year 2015 about Persevering Character as one of the solutions.

Based on aforementioned background, the problem and objective is to know the Implementation of Permendikbud No. 23 Year 2015 about Persevering Character of Seventh Graders in SMP Negeri 37 Semarang and both supporting and resisting factors. This research uses qualitative and descriptive method.

The result indicates that there seven humanitarian values in the Permendikbud No 23 Year 2015 which are Internalized Morale and Spiritual behavior, Firmness of keeping the spirit of nation and diversity in order to unite the people, Positive interaction between students and adult figure in school environment e.g. teachers as the adult figures, Positive behaviors amongst the students, Persevering the harmony of the school, Rewarding towards the uniqueness of student's potential, Participation of parents' and society's rules. From those seven humanitarian values shows several mandatory activity and customs to build the character of the students in SMP Negeri 37 Semarang.

During the execution the school implements an additional activity which is pledge of allegiance to Indonesian Flag after morning national anthem performance. This activity is being integrated into cultures and customes of the school. It is suggested that the school adds more socialization and parenting seminars revolving around the Permendikbud No. 23 Year 2015.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENUMBUHAN BUDI PEKERTI (PBP) PADA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 37 SEMARANG”.

Selama menyusun Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh.Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan M.Si., Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan Ilmunya selama masa studi kepada penulis.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

7. Bapak Drs. M. Hasan Budisulistyo, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Guru-guru SMP Negeri 37 Semarang yang telah membantu memberikan data dalam penelitian.
9. Seluruh staf dan Karyawan TU SMP Negeri 37 Semarang yang telah membantu peneliti dalam penelitian.
10. Seluruh siswa kelas VII yang bersedia memberikan informasi demi kelancaran penelitian.
11. Sahabat terbaikku Yasmine Aulia Gunawan yang telah mendukung dan membantu dalam proses penelitian.
12. Teman-temanku Bella, Elva, Murni, Fahma, Arum, Fita, Rina, Ilman, Mirza, Fahri, Arif, Wuri, Fitria dan Rizky yang tidak bosan memberikan semangat.
13. Teman-teman PKn angkatan 2012 terimakasih atas dukungannya, teman-teman PPL SMP Negeri 37 Semarang, teman-teman KKN Desa Luwung, dan teman-teman Kos Banaran.
14. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2017



Tirani Agestia
3301412044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI	vi
ABSTRACK	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. BATASAN ISTILAH.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	9
A. DESKRIPSI TEORETIS	9
1. Penumbuhan	9
2. Implementasi Kebijakan	9
a. Pengertian implementasi	9
b. Pengertian kebijakan	12
c. Konsep implementasi kebijakan	14
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP).....	15
3. Penumbuhan Budi Pekerti	24
a. Pengertian Budi Pekerti	24

b. Tujuan Penumbuhan Budi Pekerti	26
c. Penumbuhan Budi Pekerti bagi Peserta didik.....	27
4. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan.....	28
B. Kerangka berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Latar Belakang Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian	34
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Uji Validitas Data	41
F. Metode penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil penelitian	44
1. Gambaran umum objek penelitian.....	44
a. Kondisi Fisik Sekolah	44
b. Sarana dan Prasarana Sekolah.....	46
c. Sistem KBM dan Sebaran Guru, Siswa, serta Tenaga Administrasi Sekolah	49
2. Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang.....	51
a. Internalisasi sikap moral dan spiritual.....	55
b. Keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa.....	62
c. Interaksi sosial positif antara peserta didik dan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah.....	70
d. Interaksi sosial positif antara peserta didik	76
e. Memelihara lingkungan sekolah	79
f. Penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan	87
g. Penguatan peran orangtua dan unsur masyarakat terkait	94
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang	100
a. Faktor pendukung	100
b. Faktor penghambat.....	107
c. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 pada siswa kelas VII..	113
B. Pembahasan	114
1. Nasionalisme Wujud Keberhasilan Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Pada Siswa Kelas VII melalui Budaya Sekolah.....	114
2. Daya Dukung Sekolah Dalam Gerakan Penumbuhan Budi	

Pekerti Siswa Kelas VII.....	121
3. Kondisi Keluarga Yang Kurang Baik sebagai Penghambat Penumbuhan Budi Pekerti Siswa Kelas VII	125
4. Penumbuhan Budi Pekerti Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.....	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	130
A. SIMPULAN	130
B. SARAN	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN.....	137



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data ruang belajar lainnya	45
Tabel 4.2 Data ruang penunjang	45
Table 4.3 Lapangan Olahraga dan Upacara	46



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	32
Bagan 3.1 Komponen dalam analisis data	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Doa Bersama bagi yang Non Muslim	57
Gambar 4.2 Sholat Tarawih Berjamaah pada bulan Ramadhan	59
Gambar 4.3 Kultum pada bulan Ramadhan	59
Gambar 4.4 Sholat Hari Raya Idul Adha di sekolah	60
Gambar 4.5 Kegiatan Penggalangan Dana	61
Gambar 4.6 Upacara bendera setiap hari senin	62
Gambar 4.7 Menyanyikan Lagu Kebangsaan di kelas	65
Gambar 4.8 Menyanyikan Lagu Daerah di kelas	66
Gambar 4.9 Melakukan Hormat Bendera di kelas	67
Gambar 4.10 Pentas Tari siswi kelas VII saat acara HUT Sekolah	69
Gambar 4.11 Upacara Peringatan Hari Kartini	70
Gambar 4.12 Pertemuan orangtua dengan guru di aula sekolah	71
Gambar 4.13 Melakukan 5S setiap pagi di sekolah	73
Gambar 4.14 Siswi selalu melakukan 5S di sekolah	74
Gambar 4.15 Lomba pada acara peringatan Hari Kemerdekaan	79
Gambar 4.16 Kerja Bakti setiap hari Jumat	80
Gambar 4.17 Tempat sampah berbeda jenis	81
Gambar 4.18 Kampanye kreatif penggunaan air secara hemat	82
Gambar 4.19 Kantin Sekolah	83
Gambar 4.20 Siswa sedang antri berwudhu	85
Gambar 4.21 Piket harian peserta didik kelas VII di kelas	86
Gambar 4.22 Peserta didik membaca literasi di kelas	89

Gambar 4.23 Kegiatan senam jasmani setiap hari Jumat.....	90
Gambar 4.24 Siswi kelas VII bertanya kepada guru.....	91
Gambar 4.25 Group Rebana Modern SMP Negeri 37 Semarang	94
Gambar 4.26 Pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan.....	97
Gambar 4.27 Sosialisasi dari pihak Kepolisian tentang LLAJ	98
Gambar 4.28 Pertemuan Orangtua dan Guru.....	103
Gambar 4.28 Pertemuan Orangtua dan Guru.....	105



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – lampiran

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin penelitian fakultas

Lampiran 3 Surat Izin penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Semarang

Lampiran 4 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari SMP Negeri 37 Semarang

Lampiran 5 Analisis Data Penelitian

Lampiran 6 Instrumen Penelitian

Lampiran 7 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 8 Pedoman Dokumentasi Penelitian

Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Semarang

Lampiran 10 Hasil Wawancara dengan Guru SMP Negeri 37 Semarang

Lampiran 11 Hasil Wawancara dengan siswa kelas VII SMP Negeri 37 Semarang

Lampiran 12 Data Informan Penelitian

Lampiran 13 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Budi pekerti merupakan suatu nilai dasar yang mempengaruhi seluruh perilaku manusia dari segi etika, norma, dan tata krama seseorang. Budi pekerti memiliki peran yang sangat penting pada seseorang dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar istilah budi pekerti, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Namun budi pekerti di zaman sekarang sudah mulai terabaikan. Terbukti dari banyaknya perilaku anak yang tidak menghargai orangtua, tidak menjaga tutur kata ketika berbicara, sampai pada perilaku penyimpangan sosial di masyarakat. Penyimpangan sosial tidak hanya terjadi karena perilaku diri seseorang saja, melainkan mendapat pengaruh dari globalisasi.

Pada era globalisasi seperti saat ini, mudah untuk mengakses apapun yang diinginkan karena adanya perkembangan teknologi, internet dan komunikasi yang cepat dan tidak dapat dihindari. Perkembangan di bidang teknologi tersebut sudah pasti membawa dampak positif dan dampak negatif bagi remaja di Indonesia. Dampak positifnya dapat dilihat dari meningkatnya perkembangan daya saing dengan negara lain mengingat negara Indonesia adalah negara berkembang. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Hal tersebut sangat berdampak negatif di kalangan remaja seperti gaya hidup hedonis, konsumerisme,

individualistis, materialistis, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga lunturnya rasa kecintaan terhadap tanah air.

Remaja merupakan masa transisi dimana seseorang beranjak dan juga tumbuh dari anak menuju dewasa. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan proses pencarian jati diri menjadi sangat menonjol. Perubahan dan perkembangan yang terjadi memicu remaja untuk bereksplorasi dengan hal-hal baru. Dampak negatif dari adanya era globalisasi menjadi erat kaitannya dengan perilaku remaja di Indonesia. Perlunya penanaman nilai dan moral bangsa untuk memperkuat jati diri remaja guna meminimalisir pengaruh negatif dari perubahan dan perkembangan di era globalisasi (Darmanto, 2014:51).

Peneliti mencari penggalian data awal, dengan melakukan wawancara kepada responden yang merupakan seorang siswa SMP di Kota Semarang. Peneliti bertemu dengan responden di sebuah *game online center* pada jam sekolah bersama dengan teman-teman lainnya. Membolos sekolah bukan merupakan hal yang tabu lagi menurut responden dan teman-temannya. Responden beranggapan bahwa bermain di *game online center* lebih menyenangkan dibandingkan dengan belajar di sekolah.

Wawancara juga peneliti lakukan kepada guru BK SMP N 37 Semarang yang mencatat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa. Antara lain, terlambat datang ke sekolah, perkelahian antar siswa, membolos dengan alasan sakit pada jam pelajaran yang tidak disukai, hingga melakukan kecurangan pada

saat ulangan. Berdasarkan catatan, intensi untuk melakukan pelanggaran paling tinggi terjadi pada siswa kelas VII, dimana kelas VII merupakan masa peralihan.

Dilansir dalam koran Suara Merdeka pada tanggal 2 Mei 2017 yang memberitakan tentang siswa SMK Tunas Bangsa yang diamankan ke Polsek Tasik Madu, karena didapati sedang meminum minuman keras jenis ciu di warung depan sekolah. Kejadian tersebut dilakukan setelah pengumuman hasil kelulusan selesai. Tanpa memperhatikan lingkungan sekitar para siswa tersebut mengeluarkan kendaraan dan mondar-mandir berkeliling sekolah dan membuat kebisingan dan mengganggu ketertiban umum. Sehingga polisi langsung bertindak tegas karena perbuatan mereka yang masih dibawah umur.

Kenakalan remaja yang marak sekarang ini terlihat dari perilaku anak yang menyimpang. Misalnya yang diberitakan di media elektronik tentang anak-anak dibawah umur yang mengkonsumsi narkoba berbagai jenis. Mudahnya akses untuk mendapatkan barang tersebut memberi peluang untuk remaja untuk mencobanya. Mereka membeli, bertransaksi kemudian mengkonsumsi akhirnya kecanduan. Hal tersebut terjadi di luar pengawasan orangtua.

Berdasarkan fenomena remaja yang telah peneliti jabarkan, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan remaja adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan untuk membangun karakter remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Baik itu dari pendidikan formal, informal maupun non formal.

Pendidikan merupakan aktivitas hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan terjadi kontak dan komunikasi edukatif antara masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidik, maka menjadi hubungan antara pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada akhirnya melahirkan tanggung jawab pendidikan dan kewibawaan pendidikan (Hasbullah, 2005:5). Dengan demikian pendidikan formal merupakan suatu wadah untuk membentuk kepribadian anak didik selain lingkungan keluarga.

Sekolah merupakan lembaga formal yang dirancang untuk menjadi sarana pendidikan anak, yang berada di bawah pengawasan guru. Pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila mutu pendidikan nasional meningkat dari tahun ke tahun melalui penyempurnaan kurikulum. Selain pergantian kurikulum, sistem pendidikan juga harus ikut andil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Sistem pendidikan di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang pada dasarnya mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Seperti halnya dikeluarkan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) yang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2015. Dasar pelaksanaan Permendikbud tersebut adalah sebagai berikut.

“Secara teoritis setiap sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siswa, guru, dan/atau tenaga kependidikan, pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya setiap sekolah, pendidikan karakter seharusnya menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau orangtua. Namun,

yang terjadi adalah masih terbaikannya nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila yang masih terbatas pada pemahaman nilai dalam tataran konseptual, belum sampai terwujud menjadi nilai actual dengan cara yang menyenangkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat”.

Masih terbaikannya nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila yang hanya sebatas pada pemahaman dan belum terwujud dalam perilaku atau praktiknya di lingkungan pendidikan menggambarkan pentingnya penumbuhan budi pekerti pada siswa. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP).

Peneliti dalam penggalian data awal juga melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah SMP N 37 Semarang, terkait dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). Bapak Hasan mengemukakan bahwa penumbuhan budi pekerti sudah diterapkan di SMP N 37 Semarang dengan baik. Mulai dari peraturan jam masuk sekolah dan keterlambatan, kebiasaan “senyum, salam, dan sapa”, pembacaan do’a dan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Selain itu, siswa dibiasakan untuk membaca buku pelajaran 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Sebelum pulang sekolah siswa dibiasakan untuk menyanyikan lagu daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penumbuhan budi pekerti di SMP N 37 Semarang, dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO.23 TAHUN 2015 TENTANG PENUMBUHAN BUDI PEKERTI (PBP) PADA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 37 SEMARANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang, dan
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup besar baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada civitas akademika Universitas Negeri Semarang tentang implementasi Permendikbud No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah yakni SMP Negeri 37 Semarang dalam memaksimalkan Permendikbud No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti pada siswa kelas VII.
- b. Dapat memberikan masukan pada pihak Kemendikbud dan Dinas Pendidikan untuk peningkat mutu dan kualitas pendidikan khususnya penumbuhan budi pekerti di sekolah.

E. BATASAN ISTILAH

1. Penumbuhan

Penumbuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menumbuhkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penumbuhan adalah cara yang dilakukan oleh tenaga kependidikan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang, melalui program pembiasaan disekolah sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

2. Implementasi

Implementasi adalah proses melaksanakan suatu keputusan atau kebijakan (biasanya berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden) (Wahab, 2005 : 64).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah proses melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, berkaitan dengan penumbuhan budi pekerti pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang melalui kegiatan di sekolah yang dimulai dari masa orientasi, proses kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler sampai dengan lulus.

3. Budi Pekerti

Budi pekerti adalah karakter, watak, tabiat, dan sikap seseorang yang menunjukkan pribadi yang bersih dan baik. Budi pekerti terwujud dari perilaku khas seseorang yang terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan diterapkannya Permendikbud No.23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti di sekolah, generasi penerus bangsa diharapkan dapat memiliki budi pekerti yang baik sebagai bekal kehidupan masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Penumbuhan

Penumbuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menumbuhkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penumbuhan adalah cara yang dilakukan oleh tenaga kependidikan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti pada peserta di SMP Negeri 37 Semarang, melalui program pembiasaan disekolah sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Dalam hal ini penumbuhan sering disama artikan dengan kata penanaman, padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Menumbuhkan artinya menyiapkan satu lingkungan yang memungkinkan anak-anak tumbuh budi pekertinya, bukan dari luar ditancapkan dan ditanamkan. Hal pertama yang dilakukan untuk menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik adalah diajarkan kemudian dibiasakan dan dilatih secara konsisten. Setelah itu, akan menjadi kebiasaan pada peserta didik yang kemudian terbentuk karakter dan selanjutnya menjadi budaya di sekolah.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan

sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Suatu kebijakan atau peraturan tentunya berawal dari sebuah permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat maupun lembaga masyarakat. Sehingga suatu kebijakan menyebutkan secara tegas sasaran yang ingin dicapai dan cara untuk mengatur proses implementasinya. Implementasi suatu kebijakan biasanya diawali dengan tahapan

pengesahan kemudian pelaksanaan pada instansi terkait kemudian adanya proses perbaikan maupun pengawasan dari pihak terkait.

Implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2007:70). Implementasi bukan hanya sekedar aktifitas saja, namun sesungguhnya adalah rangkaian kegiatan yang dikonsep dan diterapkan secara sungguh-sungguh sesuai dengan mekanisme dan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi demi tercapainya suatu tujuan secara efektif (Setiawan, 2004:39). Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono, 2007:67).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dikemukakan beberapa poin penting dalam istilah implementasi, adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan merupakan tahap setelah terjadi keputusan kebijakan

2) Dalam implementasi kebijakan terdapat keputusan kebijakan sebagai alat administrasi hukum dijadikan dasar dalam melaksanakan kebijakan tersebut

3) Dalam implementasi kebijakan terdapat tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah proses melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, berkaitan dengan penumbuhan budi pekerti pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang melalui kegiatan di sekolah yang dimulai dari masa orientasi, proses kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler sampai dengan lulus.

b. Pengertian Kebijakan

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "*Policy*". Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Anderson dalam Wahab, 2008:2). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dalam pembicaraan-pembicaraan biasa, namun kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan public. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan public yang tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan dari Mendikbud dibuat untuk memberikan pendidikan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan di sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti ditetapkan di SMP Negeri 37 Semarang.

c. Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan menurut George C. Edwarda III adalah sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects:.. (Edward III, 1980:1).

Jadi implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip dalam Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002: 101-102).

Definisi tersebut menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu mengimplementasikannya dalam bentuk program-program secara langsung ataupun melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan kebijakan tersebut (Nugroho, 2003: 158).

Dalam penelitian ini Mendikbud mengeluarkan Peraturan, yaitu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang dilaksanakan langsung oleh SMP Negeri 37 berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut pada peserta didik khususnya kelas VII melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan sejak masa orientasi sampai dengan lulus untuk mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Mendikbud tersebut yaitu mencetak generasi muda yang berbudi pekerti luhur.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)

Peraturan yang ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2015 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

sebagai usaha pemerintah dalam menguatkan karakter anak bangsa melalui dunia pendidikan. Permendikbud No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) ini bertumpu pada pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak masa orientasi sampai dengan lulus, karena dapat menumbuhkan budi pekerti yang baik pada siswa. Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti ini dapat berjalan dengan baik, jika semua pihak terlibat didalamnya, yaitu mulai dari siswa, guru, komite sekolah, tenaga kependidikan, alumni, orangtua, sampai ke masyarakat luar sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan
- b. Menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga,sekolah, dan masyarakat
- c. Menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah,masyarakat, dan keluarga
- d. Menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat

Pelaksanaan Permendikbud No.23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti tersebut didasarkan pada tujuh nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan, sebagai berikut:

1) Internalisasi sikap moral dan spiritual

Nilai dasar internalisasi sikap moral dan spiritual yang dimaksudkan yaitu mampu menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar.

Bentuk kegiatan wajib dari internalisasi sikap moral dan spiritual di sekolah yaitu Guru dan Peserta Didik berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan Guru.

Dari bentuk kegiatan tersebut diharapkan akan membentuk contoh-contoh pembiasaan baik peserta didik antara lain:

- a) Membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah maupun bersama masyarakat.
- b) Membiasakan perayaan Hari Besar Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat.
- c) Membiasakan peserta didik menginisiasi dan melakukan kegiatan sosial.

2) Keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa.

Nilai dasar dari keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa yaitu mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama dan golongan, dipersatukan

oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan berbahasa bersama bahasa Indonesia.

Bentuk kegiatan wajib dari Penanaman nilai kebangsaan dan kebhinekaan di sekolah yaitu :

- a) Melaksanakan upacara bendera setiap hari senin dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketentuan sekolah.
- b) Melaksanakan upacara bendera pada pembukaan MOPDB untuk jenjang SMP, SMA/SMK.
- c) Sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- d) Sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu daerah, lagu wajib nasional maupun lagu terkini yang bernuansa patriotik atau cinta tanah air.

Dari bentuk kegiatan tersebut diharapkan akan membentuk contoh-contoh pembiasaan baik peserta didik antara lain :

- (a) Mengenalkan beragam keunikan potensi daerah asal siswa melalui berbagai media dan kegiatan.
- (b) Membiasakan perayaan Hari Besar Nasional dengan mengkaji atau mengenalkan pemikiran dan semangat yang melandasinya melalui berbagai media dan kegiatan.

3) Interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah

Nilai dasar interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan rumah yang dimaksudkan yaitu mampu dan mau menghormati guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, warga masyarakat di lingkungan sekolah dan orangtua. Hal tersebut bertujuan untuk membangun persepsi positif, saling pengertian, dan saling dukung demi terwujudnya pendidikan yang efektif bagi peserta didik.

Bentuk kegiatan wajib dari interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan orangtua yaitu sekolah mengadakan pertemuan dengan orangtua peserta didik pada setiap tahun ajaran baru untuk mensosialisasikan visi, aturan, materi dan rencana capaian belajar siswa agar orangtua turut mendukung keempat poin tersebut.

Dari bentuk kegiatan tersebut diharapkan akan membentuk contoh-contoh pembiasaan baik peserta didik antara lain :

- a) Peserta didik terbiasa memberikan senyum, salam dan sapaan kepada setiap orang di komunitas sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah.
- b) Guru dan tenaga kependidikan dapat datang lebih awal untuk menyambut kedatangan peserta didik.
- c) Membiasakan peserta didik untuk berpamitan dengan orangtua maupun gurur saat pergi atau datang kesekolah sesuai dengan kebiasaan yang ada di sekolah maupun rumah.

- d) Menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap orang yang lebih dewasa atau sebayanya.

4) Interaksi sosial positif antar peserta didik

Nilai dasar interaksi sosial positif antar peserta didik yaitu kepedulian terhadap kondisi fisik dan psikologis antar teman sebaya, adik kelas, dan kakak kelas.

Bentuk kegiatan wajib dalam interaksi positif antar peserta didik yaitu membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah atau rumah untuk belajar kelompok yang diketahui oleh guru dan orangtua.

Dari bentuk kegiatan tersebut diharapkan akan membentuk contoh-contoh pembiasaan baik peserta didik antara lain:

- a) Peserta didik membentuk gerakan kepedulian kepada sesama warga sekolah dengan menjenguk warga sekolah yang sedang mengalami musibah misalnya sakit, kematian dan yang lainnya
- b) Membiasakan siswa untuk saling membantu terhadap warga sekolah yang sedang mengalami kesusahan
- c) Menumbuhkan hubungan baik antara kakak kelas dan adik kelas

5) Memelihara lingkungan sekolah

Nilai dasar memelihara lingkungan sekolah yang dimaksudkan yaitu melakukan gotong royong untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah.

Bentuk kegiatan wajib dari pemeliharaan lingkungan sekolah yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan membentuk kelompok lintas kelas dan berbagi tugas sesuai usia dan kemampuan siswa.

Dari bentuk kegiatan tersebut diharapkan akan membentuk contoh-contoh pembiasaan baik peserta didik antara lain:

- a) Membiasakan penggunaan sumber daya sekolah (air, listrik, telepon, dsb) secara efisien melalui berbagai kampanye kreatif dari dan oleh peserta didik;
- b) Menyelenggarakan kantin yang memenuhi standar kesehatan;
- c) Membangun budaya peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan di bangkunya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab individu maupun kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab bersama;
- d) Mengajarkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk kelas dan bergantian saat menggunakan fasilitas sekolah;
- e) Peserta didik melaksanakan piket kebersihan secara beregu dan bergantian regu;
- f) Menjaga dan merawat tanaman di lingkungan sekolah, bergilir antar kelas;
- g) Melaksanakan kegiatan bank sampah bekerja sama dengan dinas kebersihan setempat.

6) Penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan

Nilai dasar penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan yaitu mendorong peserta didik gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi bakatnya untuk memperluas cakrawala kehidupan didalam mengembangkan dirinya sendiri.

Bentuk kegiatan wajib dari penumbuhan potensi unik dan utuh setiap anak yaitu menggunakan 15 menit sebelum pembelajaran untuk membaca buku selain buku mata pelajaran. Sedangkan untuk seluruh warga sekolah adalah mengadakan kegiatan olah fisik pada hari-hari tertentu sebelum pembelajaran seperti senam jasmani secara rutin misalnya setiap seminggu sekali.

Dari bentuk kegiatan tersebut diharapkan akan membentuk contoh-contoh pembiasaan baik peserta didik antara lain:

- a) Peserta didik membiasakan diri untuk memiliki tabungan dalam berbagai bentuk (rekening bank, celengan, dan lainnya)
- b) Membangun budaya bertanya dan melatih peserta didik mengajukan pertanyaan kritis dan membiasakan peserta didik mengangkat tangan sebagai isyarat dalam mengajukan pertanyaan
- c) membiasakan setiap peserta didik untuk selalu berlatih menjadi pemimpin dengan cara memberikan kesempatan pada setiap peserta

didik tanpa terkecuali, untuk memimpin secara bergilir dalam kegiatan-kegiatan bersama/berkelompok

- d) Siswa melakukan kegiatan positif secara berkala sesuai dengan potensi dirinya.

7) Penguatan peran orangtua dan unsur masyarakat yang terkait

Nilai dasar penguatan peran orangtua dan unsur masyarakat yang terkait yang dimaksudkan yaitu melibatkan peran aktif orangtua dan unsur masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mengawal kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah.

Bentuk kegiatan wajib dari penguatan peran orangtua dan unsur masyarakat yang terkait yaitu sekolah mengadakan pameran karya siswa pada setiap akhir tahun ajaran dengan mengundang orangtua dan masyarakat untuk memberi apresiasi pada siswa.

Dari bentuk kegiatan tersebut diharapkan akan membentuk contoh-contoh pembiasaan baik peserta didik antara lain:

- a) Orangtua membiasakan untuk menyediakan waktu 20 menit setiap malam untuk bercengkerama dengan anak mengenai kegiatan di sekolah;
- b) Sekolah bekerja sama dengan instansi swasta dan organisasi profesi untuk mengenalkan profesi dan kegiatan kemasyarakatan kepada para siswa;

Masyarakat bekerja sama dengan sekolah untuk mengakomodasi kegiatan kerelawanan oleh peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar sekolah.

4. Penumbuhan Budi Pekerti

a. Pengertian Budi Pekerti

Poerwadarminto dalam Endraswara (2006: 1) menyatakan, secara etimologi budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Kata budi berarti nalar, pikiran, watak. Sedangkan pekerti berarti penggaweyan, watak, tabiat dan akhlak. Jika kata budi pekerti berarti tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Sedangkan dalam bahasa sansekerta oleh Yatmana dalam Endraswara (2006: 1), kata budi berasal dari akar kata buddh, yaitu kata kerja yang berarti sadar, bangun, bangkit (kejiwaan). Budi adalah penyadar, pembangun, dan pembangkit. Budi adalah ide-ide. Pekerti akar kata yang berarti bekerja, berkarya, bertindak (keragaan). Pekerti adalah pekerjaan, karya, laku. Pekerti adalah tindakan-tindakan. Meskipun budi dan pekerti dapat dibedakan, namun tidak mungkin dipisahkan. Sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai realisasi tindakan dari hasil olah pikiran dan hati.

Secara operasional, budi pekerti dapat dimaknai sebagai perilaku yang tercermin dalam kata, perbuatan, pikiran, sikap dan perasaan, keinginan dan hasil karya (Gunawan, 2014 : 13). Budi pekerti diartikan sebagai sikap atau perilaku sehari-hari, baik dari individu, keluarga, maupun masyarakat bangsa yang mengandung nilai-nilai berlaku dan

dianut dalam bentuk jati dir, nilai persatuan dan kesatuan, integritas dan kesinambungan masa depan dalam suatu sistem moral, dan yang menjadi pedoman perilaku manusia (Indonesia) untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan sumber pada falsafah Pancasila dan diilhami dengan ajaran agama serta budaya bangsa Indonesia (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, 1995).

Pengertian budi pekerti mengacu pada pengertian dalam bahasa Inggris, yang diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas mengandung beberapa pengertian antara lain: (a) adat istiadat, (b) sopan santun, dan (c) perilaku. Ivonna Indah, dkk (2003: 15) mengartikan budi pekerti sebagai nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata yang memuat proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku. Namun pengertian budi pekerti secara hakiki adalah perilaku (Zuriah, 2011: 17). Sedyawati dalam Suparno (2002: 27) mengartikan budi pekerti sebagai moralitas yang mengandung pengertian antara lain adat istiadat, sopan, santun, dan perilaku. Sikap dan perilaku itu mengandung lima jangkauan, yaitu: (1) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan Tuhan; (2) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan diri sendiri; (3) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan keluarga; (4) sikap dan perilaku dalam hubungan dengan masyarakat dan bangsa; dan (5) sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Dengan demikian, dapat dinyatakan, budi pekerti itu merupakan sikap dan perilaku (tingkah laku, solah bawa, muna muni) yang dilandasi oleh kegiatan berpikir atau olah batin

akumulasi dari cipta-rasa-karsa yang diaktualisasikan kedalam sikap, kata-kata, dan tingkah laku seseorang. (Endraswara, 2006: 2).

Supriyoko dalam Endraswara (2006: 2) menjelaskan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu perilaku sosial seseorang yang didasarkan pada kematangan jiwanya sehingga melahirkan budi pekerti luhur yang berarti, sikap dan perilaku seseorang yang disamping didasarkan kematangan jiwa (internal) juga diselarasakan dengan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat sekitarnya (eksternal). Artinya, orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak akan menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas.

b. Tujuan Penumbuhan Budi Pekerti

Penumbuhan budi pekerti dilakukan melalui pendidikan. Tujuan pendidikan budi pekerti yaitu agar peserta didik mempunyai kecakapan dalam berfikir, menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mempunyai sifat-sifat yang mulia sesuai dengan karakter bangsa. Secara rinci tujuan pendidikan budi pekerti menurut Cahyoto (dalam Erna Setyowati, 2009:151) dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) mendorong kebiasaan berperilaku terpuji sesuai nilai-nilai universal dan tradisi budaya yang religius; (2) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab; (3) memupuk ketegaran mental peserta didik agar tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun sosial, dan (4) meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Sesuai dengan cita-cita dan tujuan sistem pendidikan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab saja melainkan peran lembaga seperti sekolah bahkan pemerintah sangat diperlukan. Sekarang ini pendidikan budi pekerti menjadi pelajaran di sekolah namun aplikasinya dalam

kegiatan non-kurikuler masih sering terlewatkan. Dengan dikelurkannya Permendikbud No 23 tahun 2015 diharapkan dapat membentuk kebiasaan baik sehingga dapat dibawa di lingkungan dimanapun peserta didik itu tinggal nantinya.

c. Penumbuhan Budi Pekerti bagi Peserta didik

Mendikbud menjelaskan, penumbuhan budi pekerti adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan di sekolah yang bertujuan menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah dan menumbuhkan budi pekerti anak-anak bangsa. Mendikbud mengungkapkan, pada intinya budi pekerti perlu ditumbuhkan sebagai kebiasaan bukan sebagai pengetahuan saja. Itu artinya, sesuatu hal yang dikerjakan secara rutin atau terus menerus dan apabila budi pekerti itu tumbuh sebagai kebiasaan maka akan menjadi karakter yang selanjutnya menjadi budaya (Sumber: Kemendikbud.go.id).

Pasal 1 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti dijelaskan sebagai berikut.

“Penumbuhan budi pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah. Masa orientasi peserta didik baru yang selanjutnya disebut MOPDB adalah serangkaian kegiatan pertama masuk sekolah pada setiap awal tahun pelajaran baru yang berlangsung paling lama 5 (lima) hari. Pembiasaan adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik dan membentuk generasi berkarakter positif. Sedangkan kelulusan adalah berakhirnya proses pembelajaran siswa pada satuan pendidikan”.

Jadi, penumbuhan budi pekerti merupakan serangkaian kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah mulai dari MOPDB, pembiasaan positif ketika di lingkungan sekolah sampai dengan lulus. Serangkaian kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif tersebut dilaksanakan di sekolah dengan menanamkan 7 nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan sesuai dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Metode penumbuhan budi pekerti seperti yang dijelaskan pada lembaran Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang PBP untuk jenjang sekolah menengah pertama dilakukan dengan kemandirian peserta didik membiasakan keteraturan dan pengulangan kegiatan wajib, yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru, proses kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, sampai dengan lulus.

5. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan.

Yayuk (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pendidikan dan Sosial Nuansa Pertiwi di Desa Pucang Simo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang” yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengenai pemenuhan hak anak. Pertama, pemenuhan hak kesetaraan anak hiperaktif atau anak berkebutuhan khusus dalam

pemberian fasilitas dan tabungan ataupun makanan mereka tidak dibedakan dengan anak-anak lain. Kedua, pemenuhan hak atas identitas diri dengan hasil ketika suatu lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial yang mencakup masyarakat banyak juga memperhatikan salah satu hak anak untuk memiliki identitas diri. Ketiga, pemenuhan hak atas perlindungan untuk penanganan anak yang nakal atau sangat pemalu yakni dengan mendekati anak secara perlahan.

Keempat, pemenuhan hak atas makanan salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga dalam memenuhi kebutuhan anak adalah dengan pemberian pemberian susu dan vitamin kepada anak. Kelima, pemenuhan hak atas pendidikan dilakukan lembaga dengan memberikan pendidikan dasar pada anak adalah melalui kegiatan-kegiatan anak di luar kelas, seperti kegiatan menggosok gigi bersama dan berolah raga bersama. Keenam, pemenuhan hak atas kesehatan anak yang dilakukan oleh lembaga adalah melalui kegiatan pemenuhan imunisasi dan pengecekan kesehatan anak secara rutin. Ketujuh, Pemenuhan hak rekreasi dan bermain yang dilakukan oleh lembaga diupayakan melalui kegiatan bermain bersamadan juga berekreasi di tempat wisata.

Nur Fitria (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Pendidikan Budi Pekerti dalam Membentuk Perilaku Siswa melalui Mata Pelajaran PKn pada Siswa di SMK Raden Patah Mojosari Kabupaten Mojokerto” menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian proses implementasi pendidikan budi pekerti dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Hambatan yang ditemui yaitu perilaku siswa yang melanggar tata tertib sekolah, lingkungan keluarga belum mengajarkan budi pekerti secara maksimal, pengaruh teman dan anak dari lingkungan yg kurang baik. Cara mengatasi hambatan yaitu dengan cara kerjasama antara pihak sekolah dengan orangtua untuk mengawasi tingkah laku anak dan selalu mengarahkan anak kearah yg lebih baik melalui peneguran oleh guru jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Jika dapat diuraikan dalam penelitian di atas pendidikan budi pekerti dilakukan saat proses belajar mengajar namun masih banyak siswa yang melanggar. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dengan adanya permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan pekerti dimaksudkan dapat menjadi kebiasaan yang baik bagi peserta didik sehingga muncul dari dalam dirinya kesadaran sendiri tanpa adanya dorongan dari luar untuk berindak dan berbudi pekerti yang luhur.

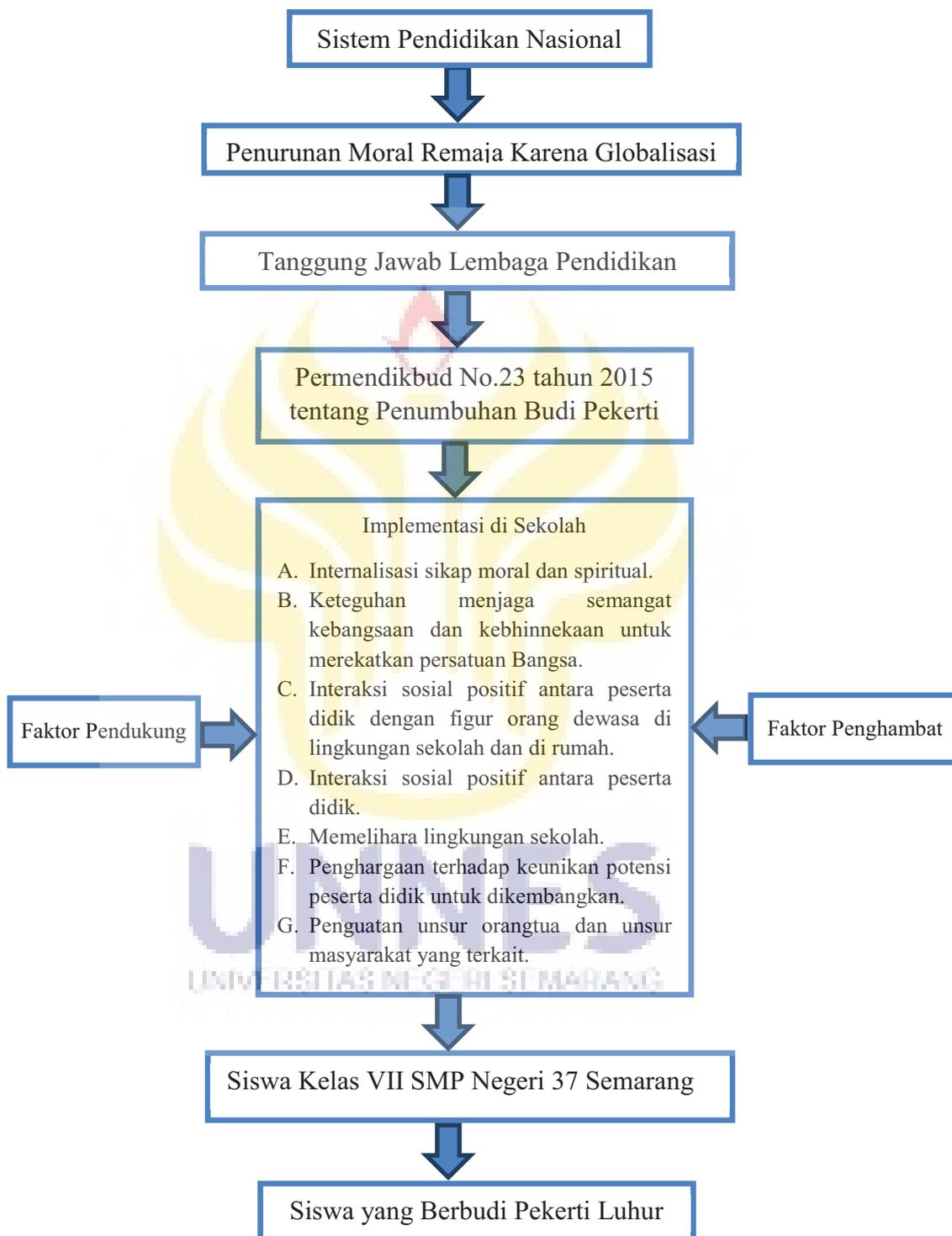
B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu alur yang digunakan peneliti dalam mengembangkan permasalahan yang dibahas menjadi jelas dan lebih terarah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Permendikbud No.23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti di SMP Negeri 37 Semarang.

Sistem pendidikan nasional dalam mengatasi penurunan moral remaja adalah melalui jalur pendidikan. Lembaga Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki perilaku remaja. Dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). Penumbuhan budi pekerti diterapkan melalui program kegiatan pembiasaan di sekolah. Program kegiatan pembiasaan tersebut meliputi: (1) internalisasi sikap moral dan spiritual; (2) keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinekaan untuk merekatkan persatuan bangsa; (3) interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah dan di rumah; (4) interaksi sosial positif antar peserta didik; (5) memelihara lingkungan sekolah; (6) penghargaan terhadap keunikan potensi peserta didik untuk dikembangkan; (7) penguatan peran orangtua dan unsur masyarakat yang terkait.

Program kegiatan pembiasaan tersebut dilaksanakan di SMP Negeri 37 Semarang, khususnya kelas VII dimana siswa masih dalam masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Tujuannya untuk menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik yang berbudi pekerti luhur.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. a. Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) sudah dilaksanakan dengan baik pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang. Karena telah menumbuhkembangkan kebiasaan baik sebagai bentuk penumbuhan budi pekerti pada siswa disekolah. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat tambahan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh siswa yaitu kegiatan menumbuhkan semangat kebangsaan dengan melakukan hormat bendera. Kegiatan pembiasaan wajib hormat bendera dilaksanakan sesuai dengan budaya sekolah.
- b. Keberhasilan dalam implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang paling menonjol adalah tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi pada diri siswa. Terbukti dengan adanya kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan wajib yaitu upacara setiap hari senin yang dilaksanakan di sekolah. Siswa datang tepat waktu, berseragam lengkap sesuai ketentuan sekolah dan mengikuti

kegiatan upacara dengan hikmat. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan bekal dalam menghadapi persaingan dimasa depan dengan membawa nama baik negara serta memiliki rasa bangga terhadap tanah air sendiri.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang. Faktor pendukung yaitu kesadaran diri siswa, daya dukung yang diberikan sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, pelibatan orangtua dalam pelaksanaan penumbuhan budi pekerti siswa, sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan pengawasan dari pihak sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu dari perilaku siswa ya kurang diatur, masih terbawa suasana masa Sekolah Dasar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) pada siswa kelas VII di SMP Negeri 37 Semarang, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi dari pihak sekolah terhadap orang tua siswa, terkait gerakan penumbuhan budi pekerti pada siswa setiap tahun awal pelajaran, dimulai secara rutin guna membimbing siswa dari pihak keluarga, sehingga ketika di sekolah nanti siswa dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya sekolah serta mematuhi peraturan sekolah dan tidak melakukan pelanggaran di sekolah.

2. Sekolah mengadakan seminar *parenting* kepada orang tua siswa, minimal setahun sekali mengenai pola asuh siswa agar tidak salah dalam mendidik anak, sehingga dapat mendukung sekolah dalam penumbuhan budi pekerti siswa agar menghasilkan siswa dengan budi pekerti luhur.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Jaya.
- , 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Jaya.
- Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. 1995. *Pedoman Pengajaran Budi Pekerti*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Darmanto, Y.D. 2017. *Masa Pencarian Jati Diri Remaja*. Sinar Harapan. <http://www.sinarharapan.co/news/read/141206002/-div-masa-pencarian-jati-diri-remaja-div->. (4 Januari 2017).
- Edward III, George. C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Budi Pekerti Jawa, Tuntutan Luhur dari Budaya Adiluhung*. Jogjakarta: Buana Pustaka Perum Pertamina.
- Fadlilah, Yayuk. L., & Listyaningsih, L. 2014. *Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pendidikan dan Sosial Nuansa Pertiwi di Desa Pucang Simo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang*. Dalam *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 3 (2).
- Gunawan, Heri. 2014. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Harsono, Hanifah. 2007. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rhineka Karsa.

- Hasbullah. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indah, Ivonna, dkk. 2003. *Pendidikan Budi Pekerti*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kemendikbud.go.id/kemendikbud/artikel-kurikulum-2013-oleh-rektor-uny-Sawali.info/2012/12/.../posisi-buku-teks-dalam-rancangan-kurikulum-2013.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- . 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Morningga, I.R. 2015. Dampak Globalisasi Remaja Masa Kini. Kompasiana. http://www.kompasiana.com/isaokke/dampak-globalisasi-terhadap-remaja-masa-kini_562d95eda623bdf3042b1438.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2015 tentang *Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)*.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Perss.
- Riant, Nugroho D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia.

- Setyowati, Erna. 2009. *Pendidikan Budi Pekerti Menjadi Mata Pelajaran Di Sekolah*. Semarang: UNNES.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti Di Sekolah, Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Usman, Nasir. 2007. *Manajemen Peningkatan Mutu Guru*. Bandung: PT. Rosdakarya
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- . 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2013. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

-----, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winataputra, Udin. 2008. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Zuriah, Nurul. 2011. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Prerspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi aksara.

